

## Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam Sekolah di Media Online Kompas.com dan Republika.com

<sup>1</sup>Devi Ambarsari, <sup>2</sup>Amalia Rosyadi Putri

<sup>12</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>12</sup>Jl. KH. Wachid Hasyim No.62 Kota Kediri

<sup>1</sup>deviambarsari99@gmail.com, <sup>2</sup>rosyadamelia3@gmail.com

### Abstract

*Online media is a means for various categories to appreciate an event or any aspect that is useful and can provide information for the public. As is the case, the online media Kompas.com and Republika.com distribute their news online, so that it is easier for readers to find the information they want. In online media, Kompas.com and Replubika.com reported the policy of the Joint Decree (SKB) of 3 Ministers under the pretext that it was an attempt to find common ground from various differences in society. With the SKB 3 Ministerial policy, it is intended that each religious community understands religious teachings substantively, and does not force them to be the same. So that the reason, in general, makes researchers feel interested in describing the function of research that is seen directly or indirectly with the Framing Analysis of the William A. Gamson model and using the political economy theory of Vincent Mosco's media. The method used in this research is descriptive qualitative, with data in the form of documents. Data collection using text analysis and online data browsing. The results of the study, which found an interesting fact that the online media Kompas.com builds a good image of the 3 Ministerial SKB Policy issued by the government. The online media Kompas.com emphasizes that this 3 Ministerial Decree was issued for the common good in responding to an existing problem. Meanwhile, Republika.com takes a broader view of the opinion of the top officials in responding to this Decree of 3 Ministers. So that Republika.com gives the impression of being critical of the emergence of this 3 Ministerial SKB rule.*

**Keywords:** Framing Analysis, News of the 3 Ministerial Decree, Kompas.com, Republika.com

### Abstrak

Media online merupakan sebuah sarana bagi berbagai kategori untuk mengapresiasi sebuah peristiwa ataupun aspek apapun yang bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat. Seperti halnya, media online Kompas.com dan Republika.com yang menyalurkan beritanya secara online, sehingga para pembaca lebih mudah mencari informasi yang mereka inginkan. Dalam media online Kompas.com dan Replubika.com memberitakan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dengan dalih itu merupakan suatu upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan adanya kebijakan SKB 3 Menteri ini bertujuan agar masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, dan tidak memaksakan untuk harus sama. Sehingga alasan tersebut secara garis besar membuat peneliti merasa tertarik untuk mendiskripsikan fungsi penelitian yang dilihat secara langsung maupun tidak langsung dengan Analisis Framing model William A. Gamson dan menggunakan teori ekonomi politik media Vincent

Mosco. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan data-data berupa dokumen. Pengumpulan data menggunakan analisis teks dan penelusuran data online. Hasil penelitian, yaitu ditemukan fakta menarik bahwa media online Kompas.com membangun citra yang baik terhadap Kebijakan SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Media online Kompas.com lebih menonjolkan bahwa SKB 3 Menteri ini dikeluarkan untuk kemaslahatan bersama dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada. Sedangkan, Republika.com lebih memandang luas dari pendapat para petinggi dalam menyikapi SKB 3 Menteri ini. Sehingga Republika.com memberikan kesan mengkritisi tentang munculnya aturan SKB 3 Menteri ini.

**Kata Kunci** : Analisis Framing, Berita SKB 3 Menteri, Kompas.com, Republika.com

## **Pendahuluan**

Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Media online ini juga produk jurnalistik online. Jurnalistik online disebut juga *cyber journalism* didefinisikan sebagai pengumpulan fakta suatu peristiwa yang kemudian ditulis atau diketik sesuai fakta yang ada, yang mana tulisan tersebut dilangsir dan berita yang ada disebar luaskan secara online di internet. Dengan munculnya media online ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat melalui pemberitaan di media online (Romli & Syamsul, 2012, hlm. 20).

Kehadiran media online membuat informasi atau berita yang disebarakan menjadi lebih cepat dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat dengan koneksi internet. Hal ini membawa perubahan tersendiri dalam perilaku komunikasi baik komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Berita di media online disajikan semenarik mungkin dengan adanya audio visual seperti di televisi. Sejarah munculnya media online di Indonesia ini, tentunya tidak terlepas dari pengaruh dinamika sosial dan politik di negeri ini. Internet merupakan salah satu teknologi di jagat baru yang menawarkan berbagai kemudahan untuk berkomunikasi dan penyebaran informasi.

Dengan melihat perkembangan teknologi yang berkembang pesat seseorang bisa mengakses informasi atau berita yang diluar kemampuan manusia. Berita adalah apa yang dilakukan oleh pengguncang dan penggerak tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mempengaruhi kehidupan individu. Berita pun merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka yang untungnya atau sayangnya telah terjadi (Kusumaningrat, 2012, hlm. 39). Seperti yang dikatakan Mc Dougall, setiap hari ada jutaan peristiwa di dunia ini dan semuanya secara potensial dapat menjadi berita (Eriyanto, 205M, hlm. 102). Menurut Blayer, berita adalah sesuatu yang dipilih oleh

wartawan untuk dimuat dalam surat kabar dapat menarik pembaca untuk membaca berita tersebut.

Kompas.com yang merupakan media online nasional yang memiliki beragam informasi. Kompas.com sebenarnya diperkenalkan pertama kalinya dengan nama kompas online pada tanggal 22 Oktober 1995. Dan dalam perkembangannya, terbentuk Kompas Cyber Media sejak 6 Agustus 1998. Kompas.com merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Di *update* selama 24 jam sehari, dengan total *readership* lebih dari 15 juta orang. Tingkat kunjungan ke kompas.com atau lebih dikenal dengan sebutan *Page View*, rata-rata mencapai 40 juta setiap bulan (<http://www.kompas.com/aboutus.php>, t.t.).

Sedangkan Republika.com pertama adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Direktur utama republika saat ini adalah Erick Thohir yang juga merupakan ketua umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan muda yang dipimpin oleh eks wartawan tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Republika.com dibangun oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui perusahaan PT Abdi Bangsa. Sehingga, republika terbit pada 4 Januari 1993. Kemudian pada tahun 1995, republika membuka situs web di internet yang dikenal dengan republika.com (*Republika (Surat Kabar)*, t.t.).

Hal menarik dari penelitian ini adalah peneliti dapat melihat korporasi dari dua media online, yakni kompas.com oleh Kompas Gramedia dan Republika.com oleh Mahaka Media. Kompas.com dikenal dengan media nasional, sedangkan Republika.com dikenal dengan media nasional untuk komunitas muslim. Media online kompas.com merupakan kumpulan-kumpulan berita terkini yang dapat langsung diakses melalui internet. Berita-berita yang terdapat dalam kompas.com memang berbeda dengan yang ada dalam kompas surat kabar, namun dengan kompas.com pembaca dapat mengetahui kejadian-kejadian yang baru terjadi tanpa harus menunggu dicetak (Prawitasari, 2013).

Dalam media masa Kompas.com dan Republika.com memberitakan kebijakan SKB 3 Menteri dengan dalih itu merupakan suatu upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan adanya SKB 3 Menteri ini bertujuan agar masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, dan tidak memaksakan untuk harus sama. Sehingga alasan tersebut secara garis besar membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti **"Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tentang Pemakaian Identitas Agama Pada Seragam Sekolah Di Media Online Kompas.Com Dan Republika.Com"**.

## Metode

Sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti, yaitu ingin menganalisis framing dari dua media online Kompas.com dan Republika.com dalam menyampaikan berita tentang kebijakan SKB 3 Menteri dalam pemakaian atribut atau seragam dengan kekhususan agama. Sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah framing pemberitaan dari media online Kompas.com dan Republika.com dalam berita kebijakan SKB 3 Menteri berdasarkan analisis framing model William A. Gamson dengan teori ekonomi politik media Vincent Mosco. Menurut Vincent Moskow teori Ekonomi Politik media dikonsepkan dalam media massa terdiri dari komodifikasi, spesialisasi, dan Strukturasi (Retpitasari, 2020, hlm. 11). Kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ketimbang mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif.

Untuk menganalisa berita, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu analisis isi (*content analysis*), analisis bingkai (*frame analysis*), analisis wacana (*discourse analysis*), dan analisis semiotik (*semiotic analysis*). Analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana khususnya untuk menganalisa teks media. Dan seperti yang telah dijelaskan di atas, hasil penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberi gambaran tentang bagaimana sebuah media online memberitakan suatu peristiwa tersebut.

Menurut William A. Gamson framing adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Sehingga peneliti memframingkan berita tentang Kebijakan SKB 3 Menteri ini dengan dua perangkat yang di buat oleh Gamson agar dapat dilihat bagaimana ide-ide tersebut dapat diterjemahkan dalam teks berita. Berikut jika dibentuk dalam sebuah frame (Jorgensen, 2007, hlm. 2):

**Tabel 1. Frame Menurut Jorgensen**

FRAME	
FRAMING DEVICES (Perangkat Framing)	REASONING DEVICES (Perangkat Penalaran)
Metaphors (Perumpamaan atau pengandaian)	Roots (Sebab-Akibat)

<p><b>Catchphrases</b> (Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan)</p>	<p><b>Appeal to Principle</b> (Premis dasar, klaim moral)</p>
<p><b>Exemplar</b> (Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian. Bisa teori atau perbandingan yang memperjelas bingkai)</p>	<p><b>Consequences</b> (Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai)</p>
<p><b>Depictions</b> (penggambaran isu bersifat konotatif, berupa kosakata, label)</p>	
<p><b>Visual Images</b> (Gambar, grafik, citrapendukung pesan yang ingin disampaikan)</p>	

Kemudian, setelah diuraikan dalam framing William A. Gamson, peneliti akan menyambungkan dengan teori ekonomi politik media Vincent Mosco, yang terdiri dari tiga partikel (Wenerda, 2015, hlm. 6). Pertama, komodifikasi adalah upaya yang dilakukan media massa dalam merubah segalanya agar dapat dijadikan sebagai alat penghasil keuntungan. Jadi komodifikasi salah satu pintu masuk dalam diskursus ekonomi politik media. Kedua, Spasialisasi, yaitu upaya yang dilakukan pemilik media untuk mengatasi jarak dan waktu, dengan pemanfaatan teknologi, agar dapat memaksimalkan kerja dalam rangka meningkatkan keuntungan. Ketiga, Spasialisasi, yaitu upaya yang dilakukan pemilik media untuk mengatasi jarak dan waktu, dengan pemanfaatan teknologi, agar dapat memaksimalkan kerja dalam rangka meningkatkan keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan ketiga komponen ini saling terkait, yaitu ketika komodifikasi berlangsung dan menghasilkan produk, maka spasialisasi perluasan intitusional adalah sebuah keniscayaan. Hal ini kemudian dibatasi oleh regulasi atau struktur tertentu yang melingkupinya (Christiani, 2015, hlm. 201–202).

**Hasil dan Pembahasan Framing Kompas.com dan Republika.com dalam Kebijakan SKB 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam Sekolah**

- a) Frame Kompas.com

**Tabel 1. Frame Kompas.com**

FRAME	
FRAMING DEVICES (Prangkat Framing)	REASONING DEVICES (Perangkat Penalaran)

<b>Metaphors</b>	<b>Roots</b>
SKB 3 Menteri mengeluarkan aturan tentang pemakaian seragam atau atribut jenjang sekolah dasar dan menengah.	Siswi non muslim di SMKN 2 Padang dipaksa memakai hijab di sekolah. Video perdebatan antara pihak sekolah dan orang tua siswi viral di media sosial.
<b>Catchphrases</b>	<b>Appeal to Principle</b>
SKB 3 Menteri sepakat untuk tidak mewajibkan atau melarang para guru dan siswa untuk menentukan seragam dan atribut yang ingin dikenakan.	Nadiem berharap masyarakat orang tua, murid dan guru juga terlibat SKB 3 Menteri agar berjalan lancar.
<b>Exemplar</b>	<b>Consequences</b>
Nadiem: semua yang mencakup SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri.	Menag: lahirnya SKB 3 Menteri diharapkan dapat mencegah konflik yang bersumber dari nilai agama.
<b>Depictions</b>	
Yaqut: memaksakan atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama hanya pemahaman agama bersifat simbolik. Padahal yang diinginkan semua pihak memahami agama secara substantif.	
<b>Visual Images</b>	
Gambar Nadiem menjelaskan isi SKB 3 Menteri tentang pemakaian seragam atau atribut di sekolah saat acara webinar.	
b) Frame Republika.com	
<b>Tabel 2. Frame Republika</b>	
<b>FRAME</b>	
<b>FRAMING DEVICES</b> (Prangkat Framing)	<b>REASONING DEVICES</b> (Perangkat Penalaran)

<b>Metaphors</b>	<b>Roots</b>
<b>Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta SKB 3 Menteri direvisi.</b>	Buya Amirsyah: aturan tentang pemakaian identitas atau atribut seragam di sekolah cukup diatur oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat tidak perlu campur tangan
<b>Catchphrases</b>	<b>Appeal to Principle</b>
<b>Gusparadi: menyangkan dan mengkritisi SKB 3 Menteri karena tidak bijak dan memicu kontroversi.</b>	Anwar Abbas: SKB 3 Menteri harus mengedepankan aturan UU pasal 29 ayat 1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menjadi negara religius bukan sekuler.
<b>Exemplar</b>	<b>Consequences</b>
<b>Gusparadi: SKB 3 Menteri terbit disebabkan oleh satu kasus, merupakan sikap pemerintah yang gagal paham dan menyikapi persoalan terlalu berlebihan.</b>	Skb 3 Menteri dianggap merusak pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
<b>Depictions</b>	
<b>Gusparadi: SKB akan salah kaprah karena membebaskan para peserta didik yang belum dewasa tersebut.</b>	
<b>Visual Images</b>	
<b>Gambar pelajar memakai seragam pramuka dilengkapi atribut kerudung (jilbab) di Banda Aceh.</b>	

***Perbedaan Antara Kompas.com dan Republika.com dalam Menyampaikan Berita SKB 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas pada Seragam Sekolah***

Media masa sebagai institusi sosial memiliki peran signifikan untuk menyajikan berita-berita SKB 3 Menteri tentang kebijakan Pemakaian Seragam atau Atribut di sekolah yang ada di Indonesia. Kebijakan tersebut membuat masyarakat, khususnya siswa menjadi bingung karena banyak berita yang beredar dari Kompas.com dan Republika.com. Pemberitaan ini menjadi sebuah ciri khas atau perbedaan masing-masing. Berikut kita lihat pada tabel antara pemberitaan media online Kompas.com dan Republika.com:

Tabel 3. Perbedaan Pemberitaan Kompas.com dan Republika.com

Media Online	Judul dan Tanggal Publish	Isi Berita
--------------	---------------------------	------------

<p><b>Kompas.com</b></p>	<p>SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan (<i>SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan, t.t.</i>). (03/02/21)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKB tersebut ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.</li> </ul>
	<p>SKB 3 Menteri: Pemda atau Sekolah tak boleh wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama (<i>SKB 3 Menteri: Pemda atau Sekolah tak boleh wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama, t.t.</i>). (03/02/21)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama,” kata Nadiem</li> <li>• Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, dengan agama apapun, dengan etnisitas apapun, dengan diversifitas apapun. Berarti semua yang mencakup SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri,” tutur Nadiem.</li> <li>• Adapun sebelum muncul SKB 3 Menteri, Seorang siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat dipaksa mengenakan jilbab oleh pihak sekolah.</li> </ul>
	<p>Poin Lengkap SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Aturan hingga Sanksi (<i>Poin Lengkap SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Aturan hingga Sanksi, 2021</i>). (05/02/21)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksa atribut agama tertentu kepada yang berbeda agama, saya kira itu bagian dari pemahaman (agama) yang hanya simbolik. Kami ingin mendorong semua pihak memahami agama secara substantif,” ujar Yaqut.</li> </ul>
	<p>SKB 3 Menteri: 6 Keputusan Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Dengan begitu keputusan SKB 3 Menteri bisa berjalan</li> </ul>



	<p>Pakaian Seragam di Sekolah Negeri (<i>SKB 3 Menteri: 6 Keputusan Utama Pakaian Seragam di Sekolah Negeri, t.t.</i>). (04/02/21)</p>	<p>lancer. Jadi masyarakat harus terlibat, baik orangtua, murid dan guru,” ujar Nadiem.</p>
<p><b>Republika.com</b></p>	<p>SKB 3 Menteri, Menag Optimis Kuatkan Toleransi di Sekolah (<i>SKB 3 Menteri, Menag Optimis Kuatkan Toleransi di Sekolah, t.t.</i>). (03/02/21)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lahirnya SKB 3 Menteri ini juga diharapkan mampu mencegah munculnya konflik yang bersumber dari nilai agama.</li></ul>
	<p>MUI: SKB Soal Seragam Sekolah Perlu Direvisi (<i>MUI: SKB Soal Seragam Sekolah Perlu Direvisi, t.t.</i>). (13/02/21)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta SKB tiga Menteri ini direvisi.</li><li>• Pemerintah tidak perlu campur tangan pada aspek ini.</li></ul>
	<p>Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Tak Bijak (<i>Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Tak Bijak, t.t.</i>). (07/02/21)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• “Saya menyayangkan dan mengkritisi SKB 3tiga Menteri itu karena tidak bijak dan berpotensi memicu kontroversi,” kata dia melalui keterangan pers di Padang.</li><li>• Menurut dia kebijakan yang diterbitkan bersama oleh Mendikbud, Menag dan Mendagri disebabkan satu kasus merupakan sikap pemerintah yang gagal paham dalam menyikapi persoalan dan sangat berlebihan.</li><li>• “Pertanyaannya bagaimana akhlak mulia para peserta didik dapat tercapai jika para siswa ‘bebas’ memilih pakaiannya,” kata politisi PAN tersebut.</li></ul>
	<p>Anwar Abbas: Catatan Untuk SKB 3 Menteri (<i>Anwar Abbas: Catatan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oleh karena itu, siswi-siswi yang beragama islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,, dan Konghucu</li></ul>

Untuk SKB 3 Menteri,  
t.t.). (05/02/21)

semestinya sesuai konstitusi harus kita wajibkan untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu karena kita ingin membuat negara kita dan anak didik serta warga bangsa aini menjadi orang-orang dan warga bangsa yang toleran sekaligus religius, bukan menjadi orang yang sekuler.

SKB Seragam Sekolah Berpotensi Merusak Pembagian Kewenangan (SKB Seragam Sekolah Berpotensi Merusak Pembagian Kewenangan, t.t.). (18/02/21)

• Menurutnya, SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemberitaan dalam kompas.com menjelaskan bahwa kebijakan surat keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan pemakaian seragam atau atribut di sekolah, ini tidak mewajibkan ataupun melarang para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk memilih seragam atau atribut yang mereka gunakan. Kemudian, SKB 3 Menteri ini di keluarkan hanya untuk sekolah dasar dan menengah saja tidak untuk sekolah swasta.

Kompas.com dalam pemberitaanya lebih detail, mengatakan bahwa 3 Menteri ini, yakni; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri ini mengeluarkan SKB dengan tujuan untuk dapat bertoleransi kepada sesama umat yang berbeda. Sehingga tidak memahami agama secara simbolik saja, akan tetapi memahami agama secara substansi.

Dalam pemberitaan Kompas.com lebih menonjol ke pemerintah dalam menyampaikan isi dari aturan baru tersebut, yakni SKB 3 Menteri tentang pemakaian atribut atau seragam di sekolah. Yang mana tidak memaksa atau tidak mewajibkan dan tidak melarang guru dan murid untuk memilih seragam atau atribut yang ingin mereka kenakan.

Sedangkan pemberitaan dalam Republika.com banyak yang mengomentari tentang terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan oleh tiga Menteri ini, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta SKB 3 Menteri untuk direvisi

kembali. Pasalnya dalam Republika.com menjelaskan bahwa SKB 3 Menteri banyak hal yang dikritisi karena dianggap kurang bijak dan memicu kontroversi.

Seperti yang telah dilangsir dalam berita Republika.com bahwa SKB 3 Menteri ini merusak pembagian wewenang antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pendidikan di Indonesia adalah salah satu kewenangan pemerintah yang sudah didesentralisasikan secara konkuren, yakni urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintahan pusat, SMA/SMK dan Pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kemudian, SKB 3 Menteri ini mengeluarkan aturan tentang pemakaian seragam atau atribut di sekolah sesuai keyakinan agama masing-masing dan SKB 3 Menteri ini berlaku di sekolah negeri jenjang sekolah dasar dan menengah. Ini yang menjadi titik berat berita yang di keluarkan oleh Republika.com, yang mana SKB 3 Menteri ini dapat menimbulkan konflik. Karena menurut Buya Amirsyah aturan pemakaian identitas atau atribut pada seragam sekolah cukup diatur oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat tidak perlu campur tangan.

Seperti yang sudah termaktup dalam analisis framing berita diatas, memberikan perbedaan antara dua media online yang mengeluarkan suatu kasus berita yang sama, akan tetapi berbeda isinya antara media online kompas.com dan republika.com. dengan menggunakan teori ekonomi politik media yang dikemukakan oleh Vincent Mosco terdapat tiga tahapan untuk membongkar rahasia yang dilakukan oleh media massa, berikut penjelasannya:

#### 1. Komodifikasi

##### a) Kompas.com

Kompas.com memberikan konten media berupa berita yang di sebarluaskan di internet atau melalui media online. Kompas.com menerbitkan sebuah berita setiap harinya sesuai dengan permasalahan dari peristiwa yang sedang terjadi, seperti tentang kebijakan SKB 3 Menteri ini. Dalam hal ini, Kompas.com tidak hanya menerbitkan berita dalam bentuk teks saja, namun juga dalam bentuk gambar, video, hingga live streaming. Sehingga, Kompas.com memiliki pengunjung aktif mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan dan total 40 juta page view per bulan. Saat ini, Kompas.com mencapai 120 juta page view perbulan. Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep *citizen journalism* dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartawankan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audia dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagai informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota.

b) *Republika.com*

*Republika.com* juga sama seperti *Kompas.com*, yakni memberikan berita yang disebarluaskan melalui media online internet. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membangun *Republika* menjadi bagian dari media massa Indonesia dan fungsi sebagai penopang agar Langkah itu bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. *Republika* dianggap memberikan harapan baru bagi komunikasi Indonesia Islam untuk tidak lagi dipinggirkan. Sehingga *Republika* tetap update dan berkembang dengan masanya. Dengan *Republika.com* menerbitkan berita-beritanya melalui media online yang mudah untuk diakses, memberikan keuntungan bagi *Republika.com*.

2. Spasialisasi

a) *Kompas.com*

*Kompas.com* menerbitkan beritanya dan menyebarkan kepada audiensnya tanpa terhalang oleh ruang dan waktu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, sehingga memberikan kemudahan bagi para pembaca saat mengakses *Kompas.com* dimana pun dan kapan pun. *Kompas.com* selalu update setiap hari dengan topik berita yang beraneka ragam, mulai dari ekonomi, politik, hingga teknologi. Namun dalam hal ini, *Kompas.com* lebih menampilkan halaman yang rapih dan bersih serta fitur baru yang lebih personal. *Kompas.com* mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan menghadirkan fitur personalisasi, karena setiap orang memiliki kebutuhan berita yang berbeda. Dengan begitu pembaca dapat dengan mudah memilih sendiri berita apa yang ingin mereka baca.

b) *Republika.com*

*Republika.com* juga menerbitkan dan menyebarluaskan beritanya kepada audiens tanpa terhalang ruang dan waktu, dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Sehingga memudahkan para pembaca saat mengakses *Republika.com* dimana pun dan kapan pun. Dengan menerbitkan berita di media komunikasi ini *Republika.com* bersaing untuk dapat menyetarakan berita yang terupdate. Dengan bantuan ICMI *Republika.com* dapat hadir di internet dengan leluasa.

3. Strukturasi

a) *Kompas.com*

Peneliti melihat keberhasilan dari media online *Kompas.com* ini sebagai media komunikasi yang dapat menerbitkan informasi-informasi yang teraktual dan menarik. Sehingga banyak pembaca yang tertarik untuk membacanya karena pengaksesannya yang mudah. *Kompas.com* tidak membedakan dari ras dan kelas pembacanya, *Kompas.com* hanya ingin masyarakat menyukai tulisan mereka untuk menangkap dan menerima permasalahan yang telah terjadi dari adanya berita tersebut.

b) *Republika.com*

Peneliti melihat bahwa *Republika.com* berhasil menjadi media komunikasi yang bermanfaat bagi pembaca. Dilihat dari usahanya *Republika.com* tetap mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan menghadirkan sebuah berita yang sekarang dapat diakses dengan mudah di internet manapun. Dalam hal ini, *Republika.com* juga menampilkan halaman wajahnya dengan rancangan dan konsep yang sederhana dan juga praktis, faktor penting dari konsep sederhana tersebut berarti *Republika.com* mudah dibaca dan peletakkannya tidak membingungkan. Sehingga *Republika* disini hadir dianggap bukan hanya untuk memberi saluran bagi aspirasi umat islam yang selama beberapa waktu terhambat, namun juga informasi yang dibutuhkan masyarakat secara pluralisme.

Adapun Relevansinya antara upaya pemerintah melalui SKB 3 Menteri ini dengan resolusi konflik radikalisme di Indonesia, media *Kompas.com* memiliki kecenderungan mendukung kebijakan SKB 3 Menteri demi terwujudkan moderasi beragama di dalam dunia Pendidikan. Adapun media *republika.com* memiliki kecenderungan kurang mendukung kebijakan SKB 3 Menteri, dalam analisis framing model William A Gamson diketahui bahwa media *republika.com* masih mengkritisi kebijakan SKB 3 Menteri, yang mana pada akhirnya kurang terbuka dengan adanya moderasi beragama.

### **Kesimpulan**

Bisa kita lihat juga berdasarkan dari penelitian diatas, bisa kita lihat bahwa media memiliki peran sangat penting dalam membawa masyarakat atau pembacanya kepada satu pemikiran yang sejalan dengan si pembuat berita. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pemakaian Identitas Agama pada Seragam sekolah dalam Media Online *Kompas.com* dan *Republika.com*. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil analisis framing model William A. Gamson:

#### **1. Frame *Kompas.com***

Pemberitaan *Kompas.com* mengenai Kebijakan SKB 3 Menteri ini, merupakan sebuah upaya membentuk opini publik tentang bagaimana pemerintah dapat mengeluarkan aturan SKB 3 Menteri ini dapat berpengaruh di masyarakat. Dari hasil analisis pembedaan disimpulkan bahwa media online *Kompas.com* membangun citra yang baik terhadap Kebijakan SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Media online *Kompas.com* lebih menonjolkan bahwa SKB 3 Menteri ini dikeluarkan untuk kemaslahatan bersama dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada.

#### **2. Frame *Republika.com***

Pemberitaan *Republika.com* mengenai Kebijakan SKB 3 Menteri ini berbeda dengan *Kompas.com*. *Republika.com* lebih memandang luas dari pendapat para petinggi dalam menyikapi SKB 3 Menteri ini. Dari segi SKB 3 Menteri ini harus direvisi menurut MUI, SKB 3 Menteri ini dapat merusak pembagian kewewenangan pemerintah dan hingga ada yang mengatakan tidak sesuai aturan undang-undang di

Indonesia. Sehingga Republika.com memberikan kesan mengkritisi tentang munculnya aturan SKB 3 Menteri ini.

## Referensi

- Anwar Abbas: Catatan Untuk SKB 3 Menteri.* (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qo1dju385/anwar-abbas-catatan-untuk-skb-3-menteri>
- Christiani, L. C. (2015). Spasialisasi Grup Media Jawa Pos. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12.
- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. LkiS.  
[Http://www.kompas.com/aboutus.php](http://www.kompas.com/aboutus.php). (t.t.).
- Jorgensen, M. W. (2007). *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Pustaka Belajar.
- Kusumaningrat. (2012). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Remaja Rosda Karya.
- Legislator: SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah Tak Bijak.* (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qo5ntn423>
- MUI: SKB Soal Seragam Sekolah Perlu Direvisi.* (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qog6iz370/mui-skb-soal-seragam-sekolah-perlu-direvisi>
- Poin Lengkap SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah, Aturan hingga Sanksi.* (2021, Juli 13). <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/05/073300165/poin-lengkap-skb-3-menteri-soal-seragam-sekolah-aturan-hingga-sanksi?page=all>
- Prawitasari, D. (2013). Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com dan Vivanews.com pada Peristiwa Runtuhnya Terowongan Tambang PT Freeport Indonesia. *Commonline Departemen Komunikasi*.
- Republika (Surat Kabar).* (t.t.). Diambil 29 Maret 2021, dari [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Republika\\_\(surat\\_kabar\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Republika_(surat_kabar))
- Retpitari, E. (2020). *Komodifikasi Kyai Pesantren Dalam Program Kiswah TV9*.
- Romli, M., & Syamsul, A. (2012). *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. PT Refika Aditama.
- SKB 3 Menteri: 6 Keputusan Utama Pakaian Seragam di Sekolah Negeri.* (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/04/091604671/skb-3-menteri-6-keputusan-utama-pakaian-seragam-di-sekolah-negeri?page=all>
- SKB 3 Menteri, Menag Optimis Kuatkan Toleransi di Sekolah.* (t.t.). Diambil 13 Juli 2021, dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/02/03/225638671/skb-3-menteri-menag-optimis-kuatkan-toleransi-di-sekolah>
- SKB 3 Menteri: Pemda atau Sekolah tak boleh wajibkan atau Larang Seragam Beratribut Agama.* (t.t.). Diambil 11 Juli 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/22244651/skb-3-menteri-pemda-dan-sekolah-tak-boleh-wajibkan-atau-larang-seragam?page=all>
- SKB 3 Menteri: Sekolah Negeri wajib Cabut Aturan Seragam Keagamaan.* (t.t.). Diambil 3 Juli 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/22244651/skb-3-menteri-pemda-dan-sekolah-tak-boleh-wajibkan-atau-larang->

seragam?page=all#:~:text=Nasional-  
,SKB%203%20Menteri%2C%20Pemda%20dan%20Sekolah%20Tak%20Boleh,a  
tau%20Larang%20Seragam%20Beratribut%20Agama&text=%E2%80%9CPeme  
rintah%20daerah%20ataupun%20sekolah%20tidak,3%2F2%2F2020)

*SKB Seragam Sekolah Berpotensi Merusak Pembagian Kewenangan.* (t.t.). Diambil 13 Juli 2021,  
dari <https://www.republika.co.id/berita/qop2sn318/skb-seragam-sekolah-berpotensi-merusak-pembagian-kewenangan>

Wenerda, I. (2015). Ekonomi Politik Vincent Moscow oleh Media Online Entertainment Kapanlagi.com. *Channel*, 3(6).